

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

Cakupan uraian yang dibahas dalam bagian ini mencakup: (i) Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen, (ii) Kondisi Demografi Penduduk Kabupaten Kebumen (iii) Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen, (iv) Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kebumen dan (v) Desentralisasi Fiskal di Tingkat Desa di Kabupaten Kebumen. Penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

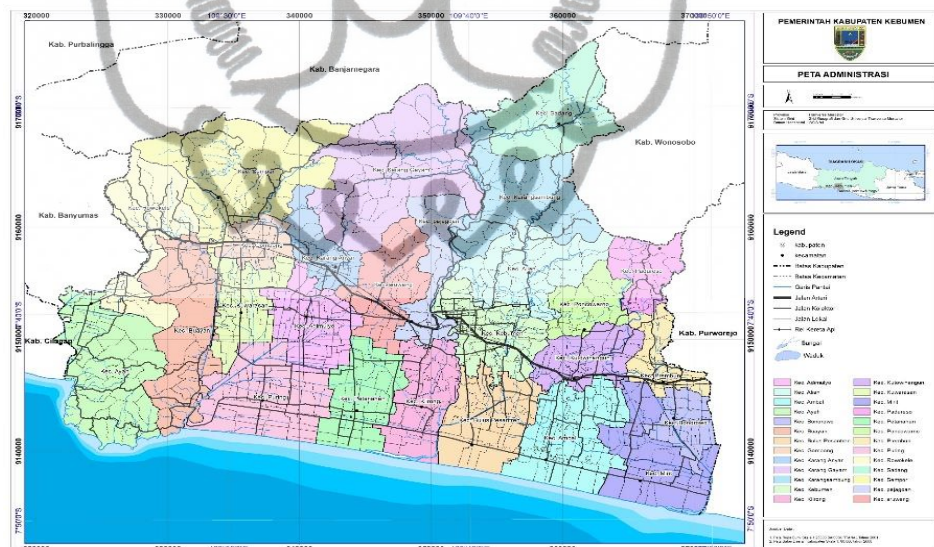
##### **1. Kondisi Geografis Kabupaten Kebumen**

Kabupaten Kebumen secara administratif merupakan wilayah yang terletak di sisi barat daya Provinsi Jawa Tengah dan termasuk ke dalam wilayah Karesidenan BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen). Kabupaten Kebumen memiliki 26 kecamatan dengan luas sebesar 1.281,115 km<sup>2</sup>, luas tersebut menjadikan Kebumen sebagai salah satu kabupaten/kota terluas di Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan terluas di Kabupaten Kebumen terletak di Kecamatan Karanggayam dengan luas sebesar 109,29 km<sup>2</sup> (8,53% luas wilayah Kabupaten Kebumen), sedangkan Kecamatan Gombong merupakan kecamatan terkecil dengan luas 19,48km<sup>2</sup> (1,52%). Kabupaten Kebumen secara langsung memiliki batas wilayah dengan 6 (enam) kabupaten lain yang berada di sekelilingnya, meliputi Kabupaten Purworejo di sisi timur, Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo di sisi

*commit to user*

utara, Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sisi barat, sedangkan di sisi selatan merupakan laut lepas Samudera Hindia.

Kabupaten Kebumen memiliki wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) kluster. Pertama yaitu **kluster pegunungan**, berada di daerah bagian utara dengan posisi membentang dari barat ke timur, dari Kecamatan Rowokele hingga Kecamatan Sadang. Kedua, **kluster dataran rendah** yang terletak di bagian tengah, yang sekaligus menjadi wilayah sentral dari berbagai kegiatan ekonomi maupun pemerintahan. Ketiga, **kluster pantai**, terletak di bagian selatan membentang mulai dari Kecamatan Mirit di sisi timur, sampai ke Kecamatan Ayah di sisi barat.



**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Kebumen**  
**Sumber: BAPPEDA Kebumen**

Setiap kluster di Kabupaten Kebumen cenderung mempunyai karakteristik yang berbeda. Pertama, **Kluster pegunungan** di bagian utara cenderung mempunyai luas wilayah yang besar, didominasi oleh lahan

pertanian dan hutan, serta bercuaca sejuk. Kedua, **kluster dataran rendah**, cenderung memiliki luas lebih kecil dibandingkan dengan kluster utara dan selatan, kegiatan pertanian tidak terlalu dominan seperti wilayah utara karena lahan yang lebih banyak digunakan untuk perumahan dan perkantoran. Ketiga, **kluster pantai**, berada di bagian selatan, dengan kondisi alam yang ada dikenal sebagian besar masyarakat dengan daerah perikanan maupun pariwisata.

**Tabel 4.1**  
**Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Kebumen**

	<i>Kecamatan</i>	<i>Luas (km<sup>2</sup>)</i>	<i>Luas (%)</i>
	(1)	(2)	(3)
1	Ayah	76,37	5,96
2	Buayan	68,42	5,34
3	Puring	61,97	4,84
4	Petanahan	44,84	3,50
5	Klirong	43,25	3,38
6	Buluspesantren	48,77	3,81
7	Ambal	62,41	4,87
8	Mirit	52,35	4,09
9	Bonorowo	20,91	1,63
10	Prembun	22,96	1,79
11	Padureso	28,95	2,26
12	Kutowinangun	33,73	2,63
13	Alian	57,75	4,51
14	Poncowarno	27,37	2,14
15	Kebumen	42,04	3,28
16	Pejagoan	34,58	2,70
17	Sruweng	43,68	3,41
18	Adimulyo	43,43	3,39
19	Kuwarasan	33,84	2,64
20	Rowokele	53,795	4,20
21	Sempor	100,15	7,82
22	Gombong	19,48	1,52
23	Karanganyar	31,40	2,45
24	Karanggayam	109,29	8,53
25	Sadang	54,23	4,23
26	Karangsambung	65,15	5,09
<b>Jumlah</b>		<b>1.281,115</b>	<b>100</b>

**Sumber:** BPS Kabupaten Kebumen, diolah.

Secara keseluruhan sebagian besar wilayah Kebumen merupakan wilayah dengan lahan pertanian, di mana lahan persawahan menjadi wilayah yang mendominasi di wilayah tersebut. Lahan pertanian di Kabupaten Kebumen didukung oleh ketersediaan dan melimpahnya sumber daya air yang cenderung tersedia sepanjang tahun, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi daerah di bagian utara Kabupaten Kebumen, seperti Kecamatan Karangsambung yang memiliki kontur pegunungan dengan bebatuan *karst* yang memiliki sifat menyimpan air didalamnya. Selain itu, luasnya lahan pertanian juga didukung dengan adanya sungai besar Luk Ulo dan Ijo yang membentang dari utara hingga ke selatan atau daerah pantai. Kabupaten Kebumen juga memiliki dua waduk dengan kapasitas cukup besar untuk menampung air, yang dipergunakan sebagai cadangan air ketika musim kemarau tiba. Kondisi tersebut mendorong sebagian besar warga Kebumen memiliki pekerjaan sebagai petani.

## 2. Kondisi Demografi Penduduk Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki penduduk yang dapat terbilang cukup besar. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen mencapai 1.195.092 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0.26%. Rincian dari angka tersebut terdiri dari 595.003 jiwa berjenis kelamin pria dan sisanya yang berjumlah 600.089 jiwa merupakan wanita.

BPS pada tahun 2020 memproyeksi Kabupaten Kebumen akan memiliki penduduk sebanyak 1.198.000 jiwa, angka tersebut didominasi

oleh penduduk kelompok usia produktif dengan nilai 64.11%, kemudian diikuti penduduk usia tua 29.94% dan penduduk usia muda sebesar 10.95%. Jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar sebenarnya cukup menguntungkan Kabupaten Kebumen dalam usahanya menangani kemiskinan di wilayah tersebut.

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan**  
**di Kabupaten Kebumen Tahun 2018.**

	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Kepadatan Penduduk/km<sup>2</sup></i>		<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Kepadatan Penduduk/km<sup>2</sup></i>
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
1	Ayah	56.901	745	15	Kebumen	124.090	2.952
2	Buayan	54.599	798	16	Pejagoan	50.263	1.454
3	Puring	53.458	863	17	Sruweng	53.833	1.232
4	Petanahan	54.352	1.212	18	Adimulyo	34.503	794
5	Klirong	54.989	1.271	19	Kuwarasan	45.666	1.349
6	Buluspesantren	53.366	1.094	20	Rowokele	42.626	792
7	Ambal	55.161	884	21	Sempor	59.622	595
8	Mirit	44.258	845	22	Gombong	47.694	2.448
9	Bonorowo	18.665	893	23	Karanganyar	34.363	1.094
10	Prembun	26.520	1.155	24	Karanggayam	48.783	446
11	Padureso	13.417	463	25	Sadang	18.267	337
12	Kutowinangun	42.477	1.259	26	Karangsambung	37.750	579
13	Alian	54.440	943		<b>Jumlah</b>	1.195.092	-
14	Poncowarno	15.029	549				

**Sumber:** BPS Kebumen, diolah.

Berdasarkan data dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwasannya

Kecamatan Kebumen merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk



terbanyak, selain itu Kecamatan Kebumen juga merupakan daerah terpadat di wilayah Kebumen, hal ini tercermin dari kepadatan penduduknya yang mencapai angka sebesar 2.952 per km<sup>2</sup>, lebih besar daripada kecamatan-kecamatan lainnya. Banyaknya penduduk yang menempati wilayah tengah seperti Kecamatan Kebumen, Pejagoan, Gombong dan Kutowinangun menandakan bahwa berbagai kegiatan di Kabupaten Kebumen, masih terkonsentrasi di wilayah tengah atau sentral dari Kabupaten tersebut.

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kecamatan yang lokasinya berada di daerah-daerah pinggiran, seperti Kecamatan Sadang, Karangsambung dan Karanggayam di sisi utara, maupun Kecamatan Mirit dan Ayah di sisi selatan. Di mana jika dilihat berdasarkan data dalam tabel 4.2 maka dapat disimpulkan daerah-daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang dapat dibilang tergolong kecil. Terkonsentrasinya kepadatan penduduk dan berbagai kegiatan yang berada di wilayah sentral atau tengah sebenarnya dapat dibilang sangat wajar. Hal ini tidak terlepas dari kondisi daerah tengah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, perkantoran dan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan atau pasar, penyedia jasa keuangan seperti bank, koperasi dan BMT, kemudian pusat kegiatan pendidikan dan perkantoran seperti SMP, SMA dan universitas. Kondisi ini menjadikan banyaknya lapangan pekerjaan yang tercipta dan menjadi daya tarik bagi kalangan masyarakat dari berbagai penjuru wilayah kabupaten untuk datang ke

wilayah tengah dalam rangka melakukan pekerjaan maupun sekedar singgah lalu kembali untuk mencukupi berbagai kebutuhan ekonomi.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Desa dan Rukun Tetangga per Kecamatan**  
**di Kabupaten Kebumen Tahun 2018.**

	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Desa</i>	<i>Jumlah RT</i>		<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Desa</i>	<i>Jumlah RT</i>
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
1	Ayah	18	396	15	Kebumen	24	554
2	Buayan	20	341	16	Pejagoan	13	257
3	Puring	23	318	17	Sruweng	21	332
4	Petanahan	21	258	18	Adimulyo	23	227
5	Klirong	24	318	19	Kuwarasan	22	247
6	Buluspesantren	21	386	20	Rowokele	11	294
7	Ambal	32	313	21	Sempor	16	368
8	Mirit	22	265	22	Gombong	12	288
9	Bonorowo	11	139	23	Karanganyar	7	242
10	Prembun	13	130	24	Karanggayam	19	390
11	Padureso	9	86	25	Sadang	7	131
12	Kutowinangun	19	241	26	Karangsambung	14	252
13	Alian	16	254	<b>Jumlah</b>		449	7.127
14	Poncowarno	11	100				

**Sumber:** BPS Kebumen, diolah.

Daerah di bagian utara Kabupaten Kebumen seperti Kecamatan Karanggayam, Sadang dan Karangsambung cenderung memiliki karakteristik wilayah yang sangat luas, namun memiliki jumlah desa yang sedikit. Daerah tersebut pada umumnya memiliki jumlah desa yang lebih

sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di kecamatan-kecamatan di daerah bagian tengah. Kecamatan Karanggayam misalnya, dengan luasan daerah yang lebih besar 2 (dua) kali lipatnya daripada Kecamatan Kebumen, tetapi memiliki jumlah desa yang lebih sedikit. Berkaitan dengan hal itu, ketika berbicara tentang perekonomian, kemiskinan dan ekonomi, ketika suatu daerah memiliki luas yang besar maka akan membutuhkan banyak anggaran untuk menjalankan berbagai program pembangunan maupun pemberdayaan di desa tersebut.

Jumlah desa juga akan berpengaruh terhadap jumlah anggaran, karena pada dasarnya ketika suatu desa sudah terbentuk, maka desa tersebut akan dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan anggaran bagi daerahnya. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan alokasi dasar bagi masing-masing desa melalui program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Kondisi di mana suatu daerah memiliki luasan yang besar tetapi jumlah desa cenderung sedikit akan berpengaruh dalam proses pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Selain itu, dengan menjadikan sebuah desa memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, akan memudahkan pemerintah dalam hal proses penggalan atau pencarian masalah-masalah hingga ke pokok permasalahan yang mendasar di suatu desa. Begitu pula dalam hal pencarian dan pemanfaatan potensi sebuah desa, akan lebih mudah ketika suatu desa memiliki wilayah yang cenderung kecil, karena



selain tersedianya anggaran yang cenderung memadai, masyarakat dan pemerintah desa akan lebih tahu dan fokus pada setiap potensi yang ada.

### 3. Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen

Kemampuan Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan daerah pada tahun 2019 masih bergantung dengan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini tercermin dari besarnya angka dana perimbangan dalam postur APBD Kabupaten Kebumen tahun 2019 yang nilainya mencapai Rp. 1.723.809.820.000 dari total pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 2.805.865.491.000, persentase dana perimbangan menyumbang 61,43% dari komposisi pendapatan daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah yang nilainya sebesar Rp. 401.172.210.000 atau jika dipersentasekan hanya menyumbang sebesar 14,29% dari komposisi pendapatan daerah. Sementara itu pada postur lain-lain pendapatan daerah yang sah nominalnya yaitu sebesar Rp. 680.883.461.000 atau jika dipersentasekan yaitu 24,26% dari komposisi pendapatan daerah pada tahun tersebut. Hal ini sebenarnya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, supaya pada waktu yang akan datang mampu untuk menciptakan sebuah kebijakan atau kegiatan yang dapat menaikkan pendapatan asli daerah. Dengan demikian secara perlahan-lahan pemerintah daerah diharapkan mampu untuk menciptakan kondisi kemandirian keuangan daerah, diharapkan berbagai kegiatan

pemberdayaan dan pembangunan daerah tersebut dapat berjalan dengan lebih maksimal lagi.

**Tabel 4.4**  
**APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2019**

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.805.865.491.000,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	401.172.210.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	100.086.758.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	29.568.538.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.920.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	258.596.914.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.723.809.820.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.114.718.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.274.201.163.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	419.493.939.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	680.883.461.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	128.147.600.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	121.596.571.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	34.569.662.000,00
1.3.7	Pendapatan Lainnya	396.569.628.000,00
2	<b>BELANJA</b>	2.960.999.393.000,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.777.513.669.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.161.295.504.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	34.764.700.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.046.965.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.635.657.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	542.770.843.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.183.485.724.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	106.605.134.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	676.020.244.000,00
2.2.3	Belanja Modal	400.860.346.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(155.133.902.000,00)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	164.603.902.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	163.103.902.000,00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	1.500.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	9.470.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.970.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	155.133.902.000,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

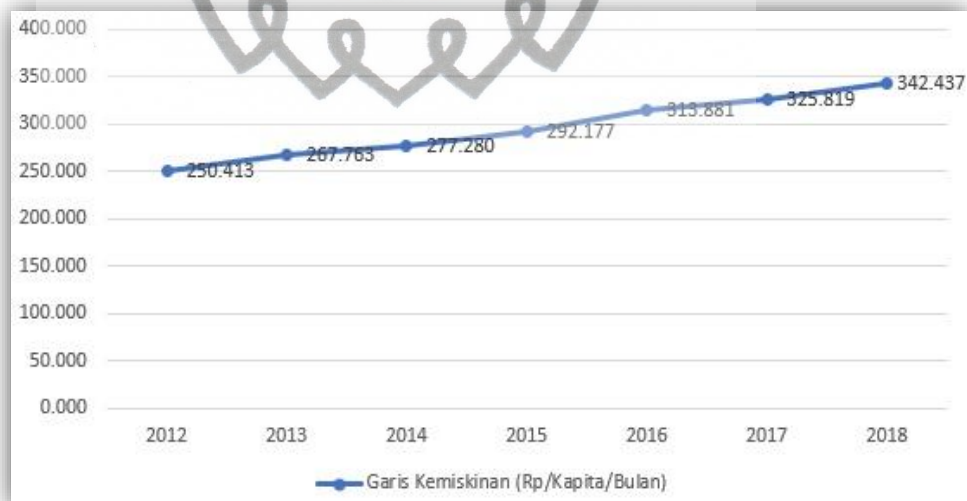
Sumber: Kebumenkab.go.id

Sisi belanja didominasi oleh belanja tidak langsung yang sebagian besar nominalnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja pegawai dengan nominal sebesar Rp. 1.161.295.504.000. Pada APBD Kabupaten

Kebumen tahun 2019, jika dilakukan penghitungan maka terjadi defisit sebesar Rp. 155.133.902.000.

#### 4. Keadaan Kemiskinan Kabupaten Kebumen

Masalah perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kebumen menjadi permasalahan utama yang tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, melainkan juga pemerintah pusat. Kemiskinan di Kabupaten Kebumen juga menjadi perhatian bagi para peneliti untuk meneliti masalah tersebut, hal ini dibuktikan dari banyaknya hasil-hasil penelitian yang membahas kemiskinan di daerah ini. Kriteria kemiskinan di Kabupaten Kebumen mengacu pada standar garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS Kebumen, di mana garis kemiskinan merupakan pengeluaran per kapita masyarakat dalam satu bulan.



**Gambar 4.2**  
**Garis Kemiskinan per Kapita Kabupaten Kebumen**  
**Sumber:** BPS Kebumen, diolah.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kebumen saat ini terletak pada persentasenya yang masih lebih tinggi jika dibandingkan kemiskinan pada tingkat provinsi maupun nasional. Sebagai kabupaten dengan predikat persentase kemiskinan tertinggi kedua di Jawa Tengah pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini mencapai angka 208.700 jiwa, atau 17,47% dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di kabupaten tersebut. Pada tahun 2019 Kabupaten Kebumen bahkan menduduki peringkat pertama sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, dengan persentase angka sebesar 16,82%. Hal ini tidak terlepas dari penurunan persentase kemiskinan yang lebih besar selama tahun 2018-2019 di Kabupaten Wonosobo. Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo awalnya berada pada angka 17,58% pada tahun 2018, dan mengalami penurunan sebesar 0,95% menjadi sebesar 16,63% pada tahun 2019.

Jumlah penduduk miskin maupun tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten Kebumen jika ditarik ke beberapa waktu belakang bisa dibilang cenderung memiliki tren yang menurun. Berdasarkan data BPS tahun 2011 misalnya, persentase kemiskinan mencapai angka 24,06%, angka tersebut merupakan angka kemiskinan tertinggi di kabupaten tersebut selama 10 tahun terakhir, setelah tahun sebelumnya pada tahun 2010 kemiskinan berada di angka 22,70%. Pada tahun 2013-2017, tren penurunan kemiskinan per tahun cenderung berada pada angka kurang dari 1%. Dan baru pada tahun 2017 ke bulan maret tahun 2018 penurunan angka

kemiskinan mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, ditandai dengan penurunan yang nilainya dua kali lipat lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 hingga 2019 tren penurunan kemiskinan cenderung kembali sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini ditandai dengan penurunan persentase angka kemiskinan yang bernilai kurang dari 1%.

Pada tahun 2019, berdasarkan data yang dihimpun dari DISPERMADES, persebaran kemiskinan di Kabupaten Kebumen terjadi secara merata di 26 kecamatan. Kecamatan Karanggayam menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dengan angka 17.070 jiwa, kemudian diikuti Kecamatan Sempor pada posisi kedua dengan angka 15.451 jiwa, dan Kecamatan Kebumen pada posisi ketiga dengan angka 11.957 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil berada pada Kecamatan Karangsambung dengan angka 1.485 jiwa.

Berdasarkan data dari tabel 4.5, dalam hal persentase penduduk miskin yang ada dalam lingkup suatu kecamatan, untuk persentase kemiskinan kondisinya relatif berbeda dengan urutan jumlah riil penduduk miskin. Namun untuk posisi pertama dan kedua kondisinya masih sama, dengan kemiskinan tertinggi masih terdapat di Kecamatan Karanggayam dengan angka 28,75%, kemudian diikuti oleh Kecamatan Sempor pada posisi kedua dengan angka 22,19% dan selanjutnya Kecamatan Prembun dengan angka 20,30%.



**Tabel 4.5**  
**Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin**  
**dalam Setiap Kecamatan pada Tahun 2019**

	<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Penduduk Miskin</i>	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>		<i>Kecamatan</i>	<i>Jumlah Penduduk Miskin</i>	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
1	Ayah	7.009	10,89	15	Kebumen	11.957	13,20
2	Buayan	9.799	15,02	16	Pejagoan	3.566	6,57
3	Puring	10.965	17,10	17	Sruweng	7.842	12,71
4	Petanahan	10.974	18,08	18	Adimulyo	6.238	16,40
5	Klirong	9.734	15,17	19	Kuwarasan	4.825	9,48
6	Buluspesantren	7.184	12,23	20	Rowokele	9.804	18,94
7	Ambal	10.263	16,24	21	Sempor	15.451	22,19
8	Mirit	7.423	13,92	22	Gombong	1.622	4,08
9	Bonorowo	4.391	19,87	23	Karanganyar	2.022	8,22
10	Prembun	5.838	20,03	24	Karanggayam	17.070	28,75
11	Padureso	1.685	10,14	25	Sadang	5.980	6,57
12	Kutowinangun	6.389	13,19	26	Karangsambung	1.485	12,70
13	Alian	11.393	17,28	<b>Jumlah</b>		193.357	-
14	Poncowarno	2.448	13,62				

**Sumber:** DISPERMADES Kebumen, diolah.

Kecamatan Kebumen yang merupakan daerah pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, pada tahun 2019 kondisi kemiskinannya berada pada posisi ke lima belas, dengan angka persentase kemiskinan sebesar 13,20%. Sedangkan tiga kecamatan dengan angka kemiskinan terendah ditempati oleh Kecamatan Pejagoan dan Sadang dengan masing-

masing angka yang sama, yaitu 6,57%, serta Kecamatan Gombong dengan angka 4,08%.

Secara keseluruhan, dalam lingkup wilayah Kabupaten Kebumen terdapat enam kecamatan yang angka kemiskinannya masih berada di atas tingkat kemiskinan kabupaten. Dalam rangka menyongsong pengentasan kemiskinan, enam kecamatan tersebut perlu untuk mendapatkan perhatian atau fokus yang lebih dari pemerintah daerah setempat. Dengan harapan bahwasannya dalam beberapa waktu kedepan pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan maksimal dan angka kemiskinan di daerah tersebut bisa ditekan hingga batas angka kemiskinan kabupaten, atau bahkan lebih rendah. Hal ini salah satunya bisa dilakukan dengan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan secara masif dan langsung hingga ke tingkat desa, terhadap semua desa yang ada di kabupaten tersebut, terlebih difokuskan di enam kecamatan tersebut.

##### **5. Desentralisasi Fiskal di Tingkat Desa di Kabupaten Kebumen**

Desentralisasi fiskal atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berada di bawahnya dalam hal penganggaran, merupakan kebijakan yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Desentralisasi fiskal di tingkat daerah mulai dari provinsi hingga desa penting untuk dilaksanakan, karena pada dasarnya pemerintah daerah yang lebih paham mengenai berbagai anggaran yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan ataupun peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pada masa sekarang ini, informasi mengenai desentralisasi fiskal sangat mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat, hal ini diharapkan agar penggunaan dana dari program tersebut dapat berjalan dengan baik ataupun maksimal. Pada pemerintahan di tingkat yang paling bawah atau desa, pemerintah mengimplementasikan hal tersebut melalui kebijakan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Tujuan utama dari pencairan berbagai dana hingga tingkat desa mempunyai tujuan utama untuk menciptakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga pada akhirnya tercipta peningkatan kesejahteraan dan menurunnya angka kemiskinan di tingkat desa. Berbagai anggaran dalam rangka desentralisasi fiskal merupakan hal yang legal dan termuat dalam undang undang.

Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi uang triliunan rupiah dari pemerintah pusat yang diberikan untuk 29 kabupaten melalui program Dana Desa. Besaran dana yang dibagikan dihitung berdasarkan berbagai macam kriteria, di antaranya adalah kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis dan berbagai hal lainnya. Salah satu kabupaten yang beberapa tahun terakhir mendapatkan Dana Desa dalam jumlah besar adalah Kabupaten Kebumen, hal ini salah satunya karena Kabupaten Kebumen memiliki wilayah yang luas, jumlah desa yang banyak dan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Selain Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, desa juga menerima Alokasi Dana Desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten.

**Tabel 4.6**  
**Jumlah ADD dan DD per Kecamatan pada Tahun 2020**

	<i>Kecamatan</i>	<i>ADD (Rp. 1000)</i>	<i>DD (Rp. 1000)</i>		<i>Kecamatan</i>	<i>ADD (Rp. 1000)</i>	<i>DD (Rp. 1000)</i>
	(1)	(2)	(3)		(1)	(2)	(3)
1	Ayah	6.518.165,3	15.667.051	15	Kebumen	8.616.525,4	21.102.895
2	Buayan	7.142.829,3	19.434.452	16	Pejagoan	4.283.051,1	12.537.488
3	Puring	8.555.269,6	20.662.126	17	Sruweng	7.663.102,8	19.483.399
4	Petanahan	7.575.309,1	17.965.297	18	Adimulyo	7.802.353,9	18.140.732
5	Klirong	8.683.523,2	20.296.241	19	Kuwarasan	7.305.329,9	18.855.658
6	Buluspesantren	8.051.823,4	18.263.393	20	Rowokele	4.670.624,3	11.900.723
7	Ambal	11.606.278,9	26.611.586	21	Sempor	6.267.749,1	17.514.791
8	Mirit	8.464.666,3	19.485.848	22	Gombong	4.386.882	9.835.317
9	Bonorowo	4.345.904,5	9.453.342	23	Karanganyar	2.703.412	6.356.079
10	Prembun	4.724.471,5	10.862.270	24	Karanggayam	6.939.173,3	21.158.769
11	Padureso	3.216.319	8.089.091	25	Sadang	5.326.018,3	16.050.153
12	Kutowinangun	7.152.355,2	16.095.765	26	Karangsambung	2.749.986,2	8.179.982
13	Alian	6.079.709,9	16.250.392		<b>Jumlah</b>	<b>164.654.912</b>	<b>409.878.212</b>
14	Poncowarno	3.824.078,5	9.625.372				

**Sumber:** DISPERMADES Kebumen, diolah.

Pada tahun 2020, secara keseluruhan desa-desa di Kabupaten Kebumen mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp. 409.878.212.000 dari pemerintah pusat, sedangkan untuk anggaran Alokasi Dana Desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten mendapatkan Rp. 164.654.912.000. Anggaran terbesar pada tahun tersebut didapatkan oleh Kecamatan Ambal, dengan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa masing-masing sebesar Rp. 11.606.278.900 dan Rp. 26.611.586.000. Penerima Alokasi Dana Desa terbesar kedua yaitu Kecamatan Klirong

dengan anggaran sebesar Rp. 8.683.523.200, sedangkan penerima Dana Desa terbesar kedua didapatkan oleh Kecamatan Karanggayam dengan anggaran sebesar Rp. 21.158.769.000.

## B. Analisis Pembahasan

### 1. Analisis untuk Rumusan Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Desa-Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2017 – 2020

#### a. Hasil Analisis Data

Cakupan uraian yang dibahas dalam bagian ini mencakup: (i) Hasil Pengolahan dengan Regresi Data Panel, (ii) Uji Pemilihan Model, (iii) Uji Asumsi Klasik, (iv) Uji Kesesuaian Model (*Goodnes of Fit*) dan (v) Uji Hipotesis Regresi Data Panel dengan Model Terbaik (*Fix Effect*). Penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1) Hasil Pengolahan dengan Regresi Data Panel

Menginterpretasikan hasil dari sebuah penelitian data panel memiliki cara yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan regresi pada umumnya. Pemilihan model terbaik pada data panel dipilih dengan memilih model terbaik antara *common effect*, *fix effect* ataupun *random effect*. Hal ini perlu dilakukan karena data panel merupakan data yang mengkombinasikan antara data *time-series* dan *cross-section*, sehingga dalam menginterpretasi sebuah hasil penelitian harus memperhatikan hal tersebut. Langkah tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji Chow, uji



Hausman maupun uji LM. Model terbaik dapat diperoleh ketika sebuah model mampu untuk memenangkan 2 dari 3 uji tersebut.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis regresi**

Variabel Dependen: JPM						
Variabel Independen	Common Effect		Fix Effect		Random Effect	
logADD	2,110343	***	1,015198	***	1,794445	***
	(0,142795)		(0,148375)		(0,128929)	
logDD	0,336262		-1,477829	***	-0,080055	
	(0,194803)		(0,221743)		(0,181212)	
logPEMDES	0,095185		0,047746		0,123905	*
	(0,061761)		(0,102883)		(0,063895)	
logBANGDES	0,097442		0,043362		0,119882	
	(0,076425)		(0,107305)		(0,076156)	
logBINMAS	0,023780		0,078168	***	0,044353	***
	(0,016343)		(0,026588)		(0,016880)	
logBERDES	0,014577		-0,090663	***	-0,015346	
	(0,023289)		(0,031760)		(0,023101)	
N	1727		1727		1727	
<i>F-test</i> (Model)	82.40204	***	4,562104	***	44,90216	***
<i>Adj. R<sup>2</sup></i>	0,220561		0,474204		0,132407	

**Sumber:** Data sekunder  
diolah, 2020

**Keterangan:** Nilai di dalam tanda kurung adalah standar error.  
Signifikansi: \*<.1, \*\*<.05, \*\*\*<.01

Dalam penelitian ini, untuk mengestimasi model dan menganalisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi E-views 10. Pada kolom pertama menunjukkan hasil estimasi yang dilakukan dengan *common effect model*. Model *common effect* atau yang sering disebut juga *pooled least square* merupakan model yang sangat sederhana jika dibandingkan dengan *fix effect* atau *random effect*. Dalam model ini terlihat bahwasannya diperoleh hasil yang cukup baik, di mana dalam model ini memiliki prob nilai *F-test* yang lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $p < 0,000$ ). Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Namun dalam model ini hanya memiliki nilai  $R^2$  sebesar 0,220561, yang berarti bahwa variabel independen hanya mampu untuk menerangkan variabel dependen sebesar 22,05%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model. Selain itu, dalam model ini hanya terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan lima variabel lainnya tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kolom kedua tabel di atas menjelaskan mengenai hasil estimasi yang dilakukan dengan model *fix effect*. Nilai *F-test* dalam model ini sama halnya seperti pada saat dilakukan pengestimasi

dengan menggunakan model *common effect*, di mana prob nilai *F-test* memiliki nilai yang lebih kecil daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $p < 0,0000$ ). Yang menunjukkan kesimpulan bahwa semua variabel independen dalam model *fix effect* secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Selain itu nilai  $R^2$  dalam model *fix effect* ini juga jauh lebih baik jika dibandingkan dalam model *common effect*. Nilai  $R^2$  sebesar 0,474204, menunjukkan bahwa variabel independen mampu untuk menerangkan variabel dependen sebesar 47,42 persen, sedangkan sisanya sebesar kurang lebih 52% dijelaskan oleh variabel di luar model. Dalam model ini, 4 (empat) dari 6 (enam) variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya.

Kolom ketiga tabel di atas, disampaikan mengenai hasil estimasi dengan menggunakan model *random effect*, yang mana diperoleh hasil prob nilai *F-test* lebih kecil daripada tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 ( $p < 0,0000$ ). Hal ini bermakna sama dengan hasil-hasil estimasi dalam model sebelumnya, di mana secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya. Dalam model ini terdapat dua dari enam variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk hasil nilai  $R^2$  yaitu sebesar 0,132407, yang berarti variabel independen dalam model

mampu menerangkan 13,24% terhadap variabel dependennya. Hasil yang kurang baik jika dibandingkan dengan menggunakan model *common effect* dan model *fix effect*.

## 2) Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model merupakan langkah selanjutnya setelah selesai dalam melakukan estimasi menggunakan ketiga model. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan uji Chow dan uji Hausman, serta uji Lagrange Multiplier (LM) jika diperlukan. Pengujian uji Chow dilakukan dengan cara memilih *pool* hasil estimasi dalam model *fix effect* kemudian pilih sub menu *fix/random testing* lalu pilih *redundant fixed effects test*. Uji ini digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan *fix effect*, di mana hipotesis yang digunakan adalah apabila  $H_0$  diterima maka model yang digunakan adalah *common effect model*, sedangkan jika  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$  maka model yang dipilih adalah *fix effect model*.

**Tabel 4.8**

**Uji Chow**

	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	2,925114	(431,12)	0,0000
Cross-section Chi-square	1178,018438	431	0,0000

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Dalam penelitian ini, berdasarkan tabel uji Chow di atas dapat disimpulkan bahwa model terbaik antara *common effect* dan *fix effect* adalah model *fix effect*. Hal ini bisa dilihat dari probabilitas *Cross-section F* yang nilainya adalah 0,0000, lebih kecil dari tingkat kesalahan  $\alpha$  sebesar 0,0500. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  atau hipotesis yang menyatakan model *common effect* adalah model terbaik ditolak.

Langkah selanjutnya ketika uji Chow telah selesai dilakukan adalah dengan melakukan uji Hausman. Uji Hausman digunakan untuk memilih model terbaik di antara model *fix effect* dan *random effect*. Langkah pengujian yang dilakukan hampir sama dengan saat melakukan uji Chow, yaitu dilakukan dengan cara memilih *pool* hasil estimasi dalam model *fix effect* kemudian pilih sub menu *fix/random testing* lalu pilih *correlated random effects*. Hipotesis yang digunakan adalah apabila  $H_0$  diterima maka model yang digunakan adalah *random effect model*, sedangkan jika  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$  maka model yang dipilih adalah *fix effect model*.

**Tabel 4.9**  
**Uji Hausman**

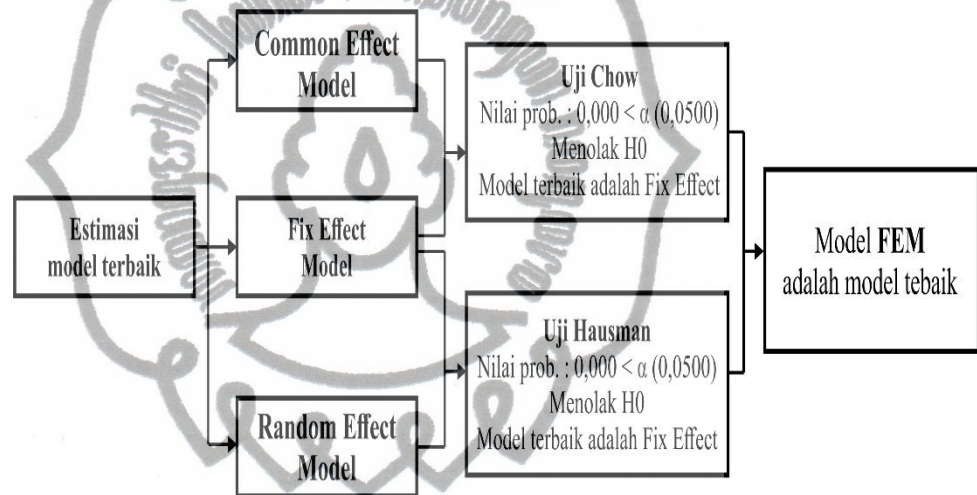
	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section	305,182699	6	0,0000
Random			

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan tabel pengujian uji Hausman di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan model terbaik di antara model



*random effect* dan model *fix effect* adalah model *fix effect*. Pengambilan keputusan ini didasarkan pada probabilitas nilai *Cross-section random* yang memiliki nilai sebesar 0,0000, bernilai lebih kecil dari  $\alpha$  sebesar 0,0500. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  atau hipotesis yang menyatakan model random adalah model terbaik ditolak, dan  $H_1$  atau hipotesis yang menyatakan bahwa model *fix effect* adalah model terbaik diterima.



**Gambar 4.3**

**Estimasi Model Terbaik dalam Penelitian Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kemiskinan di Kab. Kebumen**

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat diambil keputusan bahwa model terbaik dalam penelitian kali ini terdapat dalam model *Fix Effect*. Hal ini didasarkan pada hasil uji Chow dan uji Hausman yang telah dilakukan. Di mana pada uji Chow memiliki nilai probabilitas *Cross-section F* sebesar 0,0000, sehingga  $H_0$  yang menyatakan model common adalah model terbaik ditolak dan

*commut to user*

terpilih model *fix effect*. Dalam uji Hausman juga demikian, nilai probabilitas *Cross-section random* bernilai 0,0000, lebih kecil daripada tingkat signifikansi alfa, sehingga  $H_0$  ditolak dan terpilihlah model *fix Effect*. Karena telah menang pada dua pengujian, maka model *fix effect* ditetapkan sebagai model terbaik, dan tidak perlu lagi melakukan uji LM.

### 3) Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik merupakan sebuah uji yang harus dipenuhi agar model dalam sebuah penelitian memiliki kriteria *best*, *linier unbiased estimator* atau yang sering disingkat menjadi *BLUE*. Dalam bagian ini akan dipaparkan beberapa pengujian yang masuk dalam kriteria uji asumsi klasik, yaitu mencakup: (i) Uji Multikolinieritas, dan (ii) Uji Heteroskedastisitas. Penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### a) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan salah satu uji dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam rangka untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi ataupun hubungan yang sempurna antar variabel pada suatu model. Dalam pengujian menggunakan *E-views* masalah multikolinieritas dapat dilihat melalui nilai koefisien korelasi, yang jika nilainya lebih kecil dari 0,9 maka disimpulkan tidak terdapat masalah tersebut. Atau bisa juga dengan melihat nilai VIF (*Vairan Inflation Factor*),

yang apabila nilainya lebih kecil dari 10, maka pengujian atau penelitian tersebut terbebas dari masalah multikolinieritas.

**Tabel 4.10**  
**Uji Multikolinieritas**

	LOG ADD	LOG DD	LOG PEMDES	LOG BANGDES	LOG BINMAS	LOG BERDES
LOG ADD	<b>1,0000</b>	0,6335	0,2098	0,2251	0,0517	0,1864
LOG DD	0,6335	<b>1,0000</b>	0,0723	0,3980	0,0404	0,1562
LOG PEMDES	0,2098	0,0723	<b>1,0000</b>	-0,0101	0,1008	0,0936
LOG BANGDES	0,2251	0,3980	-0,0101	<b>1,0000</b>	0,0034	-0,2010
LOG BINMAS	0,0517	0,0404	0,1008	0,0034	<b>1,0000</b>	-0,1135
LOG BERDES	0,1864	0,1562	0,0936	-0,2010	-0,1135	<b>1,0000</b>

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai-nilai korelasi antara variabel LOGADD, LOGDD, LOGBANGDES, LOG BERDES, LOGBINMAS dan LOGPEMDES nilainya tidak ada yang lebih besar dari angka 0,9. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian kali ini terbebas dari adanya masalah multikolinieritas.

#### **b) Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari salah satu uji dalam pengujian asumsi klasik, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari residual pada sebuah model. Berbeda dengan masalah autokorelasi, masalah heteroskedastisitas biasanya banyak dijumpai ketika data pada sebuah penelitian berbentuk *cross-section*. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, antara lain yaitu menggunakan metode LM Arch, White Heteroskedasticity, Glejser maupun yang lainnya. Adapun kriteria dari uji ini jika menggunakan metode White Heteroskedasticity adalah apabila nilai probabilitas *Obs\* R-Squared* lebih besar dari nilai tingkat kesalahan alfa sebesar 5%, maka dipastikan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.11**  
**Uji Heteroskedastisitas**

<b>F-statistic</b>	2,461103	<b>Prob. F (6,1720)</b>	0,0225
<b>Obs*R-squared</b>	14,70051	<b>Prob. Chi-Square (6)</b>	0,0227
<b>Scaled explained SS</b>	31,64162	<b>Prob. Chi-Square (6)</b>	0,0000

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwasannya nilai probabilitas *Obs\* R-Squared* lebih kecil dari pada dari nilai tingkat kesalahan alfa sebesar 5%, yaitu 0,0227, sehingga dapat disimpulkan terdapat masalah heteroskedastisitas pada

pengujian kali ini. Adapun untuk mengatasi atau mengobati masalah heteroskedastisitas, digunakan metode pemberian *weighting* atau pemberian beban dengan opsi *cross-section weight* pada saat melakukan pengestimasian atau pengolahan model terbaik. Namun, karena dalam penelitian ini juga terdapat masalah *cross-sectional correlation*, serta sampel yang digunakan juga sangat banyak, maka untuk mengatasi masalah ini menurut Beck and Katz (1995) dapat menggunakan metode pemberian *weighting* atau pembobotan dengan metode *cross-section SUR PCSE* pada saat melakukan uji pemilihan model terbaik.

#### 4) Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit*)

Berdasarkan beberapa pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa model *fix effect* merupakan model yang terbaik untuk menganalisis dan menginterpretasi hasil dalam penelitian kali ini. Langkah selanjutnya dalam menginterpretasi hasil dalam penelitian kali ini adalah dengan melihat kesesuaian model melalui uji *Goodness of fit*. *Goodness of fit* atau analisis koefisien determinasi disesuaikan atau yang sering juga disebut *Adjusted R-squared* merupakan angka yang menunjukkan seberapa besar persentase pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi suatu variabel dependen.



Kriteria angka *Adjusted R-squared* yaitu apabila mendekati 1, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen mampu menerangkan variabel dependennya. Begitu juga sebaliknya, ketika angka *Adjusted R-squared* mendekati 0, dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen kurang mampu dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R-squared	Adjusted R-squared	S.E of Regression
0,834286	0,778105	0,290173

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* yaitu sebesar 0,778105, yang berarti bahwa variabel independen (Alokasi Dana Desa, Dana Desa, serta belanja desa untuk pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa dan pembinaan masyarakat) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (jumlah penduduk miskin) sebesar 77,81%. Sedangkan 22,19% lainnya mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kondisi jumlah penduduk miskin pada setiap desa di Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020 dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model.

##### 5) Uji Hipotesis Regresi Data Panel dengan Model Fix Effect

Cakupan uraian yang dibahas dalam bagian uji hipotesis dengan analisis regresi data panel yaitu mencakup: (i) Uji F

(pengaruh variabel independen secara simultan) serta (ii) Uji t (pengaruh variabel independen secara parsial). Penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### a) Uji F

Uji F atau yang sering juga disebut dengan uji Anova merupakan pengujian yang dilakukan guna mengetahui suatu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Kriteria pengambilan keputusan pada saat pengujian dengan uji F bisa dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel, atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan melihat probabilitas nilai F tersebut. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji F**

F-statistic	Prob. (F-statistic)
14,85002	0,0000

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji F tersebut diperoleh nilai Probabilitas F sebesar 0,0000, yaitu lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa

variabel Alokasi Dana Desa, Dana Desa serta belanja desa untuk pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan desa secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin desa di Kabupaten Kebumen.

#### b) Uji t

Perbedaan uji t dengan uji F terletak pada pengaruh suatu variabel independen terhadap dependen jika dilihat dari segi parsial atau simultan. Uji t berguna untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial atau sendiri-sendiri. Adapun untuk pengambilan keputusan menggunakan kriteria yang sama dengan uji F, di mana jika probabilitas t-statistic lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 maka suatu variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Coefficient	Std. error	t-Statistic	Prob.
C	12,59161	5,183111	2,429354	0,0153
logDD	-1,427619	0,285358	-5,002903	0,0000
logADD	0,259201	0,454358	0,570478	0,5685
logPEMDES	0,041947	0,037345	1,123215	0,2616

logBANGDES	0,035883	0,056569	0,634321	0,5260
logBINMAS	0,079726	0,025741	3,097262	0,0020
logBERDES	-0,094867	0,017313	-5,479639	0,0000

**Sumber:** Data sekunder diolah, 2020.

Berdasarkan hasil estimasi dengan model fix effect, maka dapat terbentuk persamaan regresi pengaruh DD, ADD serta belanja desa untuk pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$JPMit = 12,59161 - 1,427619DDit + 0,259201ADDit + 0,041947PEMDESit + 0,035883BANGDESit + 0,079726BINMASit - 0,094867BERDESit + Uit \dots (4.1)$$

Berdasarkan probabilitas *t-statistic* dan persemaan regresi tersebut, maka hasil yang tetera pada tabel di atas dapat diinterpretasikan berdasarkan masing-masing variabel ke dalam penjelasan yang lebih detail seperti berikut:

#### (1) Konstanta

Konstanta dalam persamaan regresi kali ini bernilai positif sebesar 12,59161, yang berarti bahwa ketika semua variabel independen (DD, ADD dan belanja desa) dianggap konstan atau tidak ada perubahan, maka rasio jumlah penduduk miskin adalah 12,59161%. Secara lebih detail, perubahan kondisi jumlah penduduk miskin dari

masing-masing desa dapat dilihat berdasarkan nilai intersep *cross-section* yang terdapat pada hasil pengolahan dengan model *fixed effect*.

Berdasarkan nilai intersep akhir terlihat bahwa, terdapat 217 dari 432 desa yang memiliki nilai intersep di atas rata-rata dari nilai intersep yang ada. Desa Sampang, Desa Krakal, Desa Donorojo, Desa Plumbon, Desa Wonoharjo, Desa Kedungwringin, Desa Seliling, Desa Selogiri, Desa Tambakmulyo dan Desa Glontor merupakan 10 (sepuluh) desa dengan nilai intersep tertinggi. Nilai intersep tersebut menandakan bahwa, ketika seluruh variabel independen (desentralisasi fiskal di tingkat desa) dalam penelitian dianggap konstan, maka kesepuluh desa tersebut memiliki pertumbuhan jumlah penduduk miskin yang relatif tinggi dibandingkan dengan desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Kebumen. Adapun nilai intersep terbesar yang terdapat di Desa Sampang bernilai sebesar 13,560522, sedangkan nilai intersep yang terdapat pada Desa Glontor yaitu bernilai sebesar 13,30943.

Sementara itu, Desa Pesuruhan, Tegalrejo, Karangglonggong, Kalijering dan Pencil merupakan 5 (lima) desa dengan nilai intersep terendah di Kabupaten

Kebumen, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika variabel independen (desentralisasi fiskal di tingkat desa) dalam penelitian dianggap konstan, maka kelima desa tersebut merupakan desa yang relatif berhasil dalam mengendalikan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan desa-desa lain di Kabupaten Kebumen. Desa Pencil yang merupakan desa dengan nilai intersep terkecil, memiliki nilai intersep sebesar 11,547755, diikuti Desa Kalijering sebesar 11,551367, Desa Karangglonggong sebesar 11,56037, Desa Tegalrejo sebesar 11,671155 dan Desa Pesuruhan 11,678847.

## (2) Dana Desa

Koefisien variabel Dana Desa dalam hasil persamaan regresi di atas diketahui bernilai sebesar -1,427619 dengan probabilitas *t-statistic* sebesar 0,0000. Hal ini berarti bahwa di antara variabel Dana Desa (variabel independen) dan jumlah penduduk miskin (variabel dependen) mempunyai arah hubungan yang negatif dan pengaruhnya signifikan. Di mana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan nominal anggaran Dana Desa sebesar 1%, maka secara signifikan akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin di setiap desa di Kabupaten Kebumen menurun sebesar 1,42%.



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Daforsa dkk (2019) tentang analisis manajemen Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan di Pasaman, Sumatera Barat. Di mana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa Dana Desa secara signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan, yang berarti bahwa setiap kenaikan pemberian Dana Desa mampu untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian Ramly dkk (2018) juga mendapatkan hasil bahwa setiap kenaikan Dana Desa memiliki pengaruh secara signifikan dan arahnya negatif terhadap kemiskinan di Nagas Raya.

Penelitian yang dilakukan Amin dan Nanda (2019) juga menguatkan hasil pada variabel Dana Desa ini, di mana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan Dana Desa mampu untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan di masyarakat, yang mana pemberdayaan itu secara tidak langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Hal berbeda terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachma dkk (2019) dan Susilowati dkk (2019) yang menyatakan bahwa Dana Desa memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini berarti bahwa setiap kenaikan Dana Desa justru akan meningkatkan

kemiskinan. Sementara itu, Akbar & Estro (2019) mengemukakan bahwa anggaran Dana Desa berpengaruh terhadap terselesaikannya berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur.

### (3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Koefisien variabel Alokasi Dana Desa dalam hasil persamaan regresi di atas diketahui bernilai sebesar 0,259201 dengan probabilitas *t-statistic* sebesar 0,5685. Hal ini berarti bahwa di antara variabel alokasi Dana Desa (variabel independen) dan jumlah penduduk miskin (variabel dependen) mempunyai arah hubungan yang positif namun pengaruhnya tidak signifikan. Di mana dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan nominal anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 1%, maka secara tidak signifikan akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin di setiap desa di Kabupaten Kebumen meningkat sebesar 0,26%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Irama (2018), yang menyebutkan bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung, Alokasi Dana Desa memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemiskinan di 81 desa yang ada di Provinsi Sumatera Utara, hanya saja pada pengaruh

langsung arahnya yaitu positif, dan pada pengaruh secara tidak langsung berpengaruh negatif. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Agustanta dkk (2018) serta Lalira dkk (2018), yang menyatakan bahwa anggaran Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil yang berbeda didapatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dkk (2017), yang mana penelitian itu dilakukan untuk mengetahui pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa mampu untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur secara signifikan.

Hal yang sama juga terjadi dalam penelitian Aslan dkk (2019) yang menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa secara signifikan dan mempunyai arah hubungan yang negatif dalam pengentasan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mahakam Ulu.

#### **(4) Belanja Desa untuk Pemerintahan Desa (PEMDES)**

Koefisien variabel PEMDES dalam hasil persamaan regresi di atas diketahui bernilai sebesar 0,041947 dengan probabilitas *t-statistic* sebesar 0,2616. Hal ini berarti

*commut to user*

bahwa di antara variabel PEMDES (variabel independen) dan jumlah penduduk miskin (variabel dependen) mempunyai arah hubungan yang positif dan memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Di mana dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan nominal anggaran belanja desa untuk pemerintahan desa (PEMDES) sebesar 1%, maka secara tidak signifikan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di setiap desa di Kabupaten Kebumen sebesar 0,04%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daforsa dkk (2019) yang menyatakan bahwa anggaran pemerintahan desa tidak memiliki dampak signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dikarenakan anggaran tersebut lebih banyak digunakan untuk hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional, selain itu dana yang dialokasikan jumlahnya juga bisa dibilang hanya sedikit, sehingga dampak yang ditimbulkan untuk menangani kemiskinan tidak signifikan.

#### **(5) Belanja Desa untuk Pembangunan Desa (BANGDES)**

Koefisien variabel BANGDES dalam hasil persamaan regresi di atas diketahui bernilai sebesar 0,035883 dengan probabilitas *t-statistic* sebesar 0,5260.

Hal ini berarti bahwa di antara variabel BANGDES (variabel independen) dan jumlah penduduk miskin (variabel dependen) mempunyai arah hubungan yang positif serta memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Di mana dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan nominal anggaran belanja desa untuk pembangunan desa (BANGDES) sebesar 1%, maka secara tidak signifikan akan meningkatkan jumlah penduduk miskin di setiap desa di Kabupaten Kebumen sebesar 0,03%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernita dan Cut Putri (2019), di mana dalam penelitian yang meneliti tentang pengaruh jumlah anggaran pembangunan desa dan jumlah bangunan fisik terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, didapatkan hasil bahwasannya kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Nugraheni dkk (2018) yang meneliti tentang analisis dampak alokasi anggaran desa dan infrastruktur desa pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Semarang, di mana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa setiap kenaikan anggaran yang digunakan untuk pembangunan

infrastruktur desa mempunyai dampak signifikan dengan arah positif terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Hal yang berbeda juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Daforsa dkk (2019), di mana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa anggaran pemerintah desa yang digunakan untuk pembangunan desa memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan, di mana setiap kenaikan 1% anggaran untuk pembangunan infrastruktur desa mampu mengurangi kemiskinan sebesar 23,25%.

Penelitian Daforsa dkk (2019) juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Wijaya dan Marhaeni (2019), bahwa anggaran pemerintah desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa secara signifikan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Mendoyo, Jembrana, Bali.

#### **(6) Belanja Desa untuk Pembinaan Masyarakat Desa (BINMAS)**

Koefisien variabel BINMAS dalam hasil persamaan regresi di atas diketahui bernilai sebesar 0,079726 dengan probabilitas *t-statistic* sebesar 0,0020. Hal ini berarti bahwa di antara variabel BINMAS (variabel independen) dan jumlah penduduk miskin (variabel dependen)



mempunyai arah hubungan yang positif dan memiliki pengaruh signifikan. Di mana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan nominal anggaran untuk pembinaan masyarakat desa sebesar 1%, maka secara signifikan akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin di setiap desa di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan sebesar 0,07%.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni dkk (2018), di mana dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa belanja desa yang digunakan untuk pembinaan masyarakat memiliki hubungan positif dengan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Sementara itu Daforsa dkk (2019) mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan anggaran belanja desa yang digunakan untuk pembinaan masyarakat memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan.

Dalam penelitian kali ini, sebenarnya dapat dijelaskan mengapa anggaran belanja desa untuk kegiatan pembinaan masyarakat belum mampu dalam mengentaskan kemiskinan yang ada. Hal ini diduga

karena anggaran untuk pembinaan masyarakat pada umumnya lebih diarahkan untuk kegiatan-kegiatan pembinaan yang tidak mengarah pada pemberdayaan *skill* atau keahlian serta pengetahuan yang berorientasi pada profit untuk masyarakat. Sehingga ketika kegiatan pembinaan selesai, maka masyarakat tidak memiliki suatu keahlian yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan atau pendapatan.

Nugraheni dkk (2019) menyebutkan bahwa sering dijumpai anggaran belanja desa untuk pembinaan masyarakat digunakan untuk honor-honor tenaga teknis yang seharusnya tidak menggunakan anggaran dari belanja untuk pembinaan masyarakat.

#### **(7) Belanja Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa (BERDES)**

Koefisien variabel BERDES dalam hasil persamaan regresi di atas diketahui bernilai sebesar -0,094867 dengan probabilitas nilai *t-statistic* sebesar 0,0000. Hal ini berarti bahwa di antara variabel belanja desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat atau BERDES (variabel independen) dan jumlah penduduk miskin (variabel dependen) mempunyai arah hubungan yang negatif dan memiliki pengaruh signifikan. Di mana

dapat dijelaskan bahwa setiap kenaikan nominal anggaran belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat desa (BERDES) sebesar 1%, maka secara signifikan akan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di setiap desa di Kabupaten Kebumen sebesar 0,09%.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Daforsa dkk (2019), di mana dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa setiap kenaikan anggaran belanja desa untuk kegiatan pemberdayaan memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kemiskinan, ini berarti bahwa setiap kenaikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat mampu mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada.

Nugraheni dkk (2018) mendapati hasil penelitian yang berbeda, di mana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa anggaran untuk pemberdayaan masyarakat mempunyai pengaruh signifikan positif dalam pengentasan kemiskinan, yang berarti bahwa setiap kenaikan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat justru meningkatkan tingkat kemiskinan yang ada.

## 2. Analisis Pembahasan untuk Rumusan 2

Desentralisasi fiskal di tingkat desa di desa-desa di Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik dari waktu ke waktu. Hal ini

*commit to user*

dibuktikan dengan tren menurunnya persentase maupun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen dari tahun 2011 hingga tahun 2020, meskipun akhirnya pada tahun 2019 ditetapkan sebagai kabupaten dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, hasil kerja keras dari berbagai pihak dalam mengentaskan kemiskinan haruslah tetap diapresiasi.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat desa bisa dibilang sudah berjalan dengan cukup baik karena sudah mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya program Alokasi Dana Desa, Dana Desa, pemberian bantuan-bantuan lain untuk desa dan juga kewenangan desa dalam menentukan anggaran untuk belanja berbagai kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Faktor lain yang menjadi pendorong berjalan dengan baiknya desentralisasi fiskal di tingkat desa adalah adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang melibatkan unsur tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong program-program maupun kebijakan yang difokuskan untuk memonitoring desentralisasi fiskal melalui pelaporan penggunaan anggaran berbasis *online* dengan sistem web, hal ini dimaksudkan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan dalam rangka transparansi anggaran.

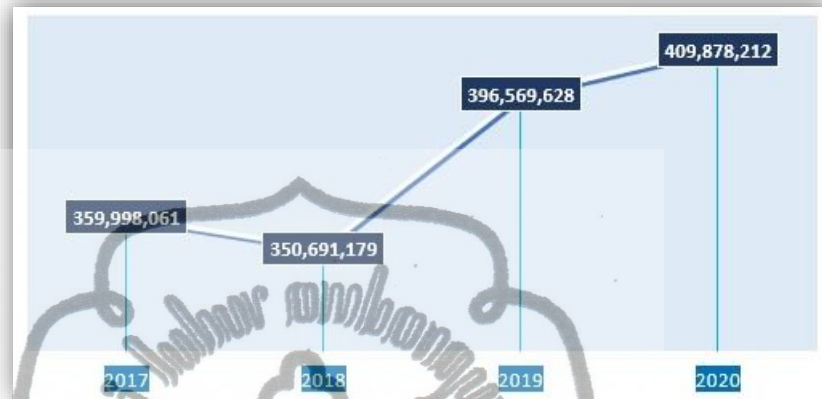
Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan dalam pembahasan sebelumnya maka dapat diketahui apa saja faktor-faktor dari

kebijakan desentralisasi fiskal di tingkat desa yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di desa-desa di Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020. Dalam hasil penelitian didapatkan bahwa, 2 (dua) di antara 6 (enam) variabel yang digunakan dalam penelitian menunjukkan hasil yang signifikan dan memiliki arah hubungan yang negatif dalam pengentasan kemiskinan. Adapun dua variabel tersebut adalah: (i) Dana Desa, dan (ii) Belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat atau (BERDES). Penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

**a. Dana Desa**

Variabel Dana Desa merupakan variabel yang paling berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di desa-desa di Kabupaten Kebumen selama tahun 2017-2020. Hal ini berdasarkan hasil analisis statistik yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% anggaran Dana Desa mampu untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 1,42%. Hasil yang diperoleh dari penerapan kebijakan ini sangat maksimal karena angka pengaruhnya lebih tinggi daripada anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dijelaskan karena, Dana Desa merupakan sumber pendapatan terbesar dalam postur pendapatan dalam APB Desa yang diterima oleh setiap desa. Besaran nominal Dana Desa bahkan mencapai dua kali lipat lebih besar daripada anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Sehingga sebagian besar kegiatan yang ada di masyarakat, baik

kegiatan pemberdayaan, pembinaan, pembangunan maupun teknis, umumnya ditopang dengan anggaran ini.



**Gambar 4.4**  
**Dana Desa yang Diterima oleh Kabupaten Kebumen**  
**dari Tahun 2017-2020 (dalam Rp 1.000)**

**Sumber:** DISPERMADES Kebumen, diolah.

Dari gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwasannya jumlah Dana Desa yang diterima Kabupaten Kebumen dari tahun 2018 sampai 2020 selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 Dana Desa di Kabupaten Kebumen mencapai Rp. 409.878.212.000. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah Dana Desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehingga ketergantungan penanggulangan kemiskinan juga akan sangat bergantung dari kebijakan dan jumlah anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Selama pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perdesaan masih menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini juga akan berdampak baik dalam kelancaran pencairan anggaran Dana Desa. Sehingga berbagai kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan dan pengentasan



kemiskinan di tingkat desa akan mengalami tren yang baik. Bisa dibayangkan jika suatu desa tidak mendapatkan anggaran Dana Desa, berbagai kegiatan akan cenderung berjalan dengan kurang baik atau bahkan bisa berhenti, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi yang cenderung memperburuk kemiskinan di sebuah desa.

**b. Belanja Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (BERDES)**

Variabel belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat atau BERDES merupakan variabel kedua yang paling berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di desa-desa di Kabupaten Kebumen. Menurut hasil analisis statistik pada bagian pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2020. Adapun untuk pengaruh yang diberikan yaitu, ketika pemerintah desa menaikkan anggaran belanja untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel belanja desa untuk pemberdayaan masyarakat merupakan variabel kedua yang paling berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen setelah variabel Dana Desa.

Kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu kegiatan atau program yang diprioritaskan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, pendapatan, ekonomi

maupun hal-hal lain yang mampu mendorong kemandirian perekonomian bagi warga desa. Menurut Pasal 8 dalam PERMENDESA PDTT No. 21 Tahun 2015, kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti berikut:

- 1) Kegiatan peningkatan investasi ekonomi di tingkat desa dengan kegiatan pengadaan dan pengembangan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan yang dapat meningkatkan *skill* atau keahlian masyarakat melalui program pelatihan dan pemagangan.
- 2) Pengembangan badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama, baik oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa.
- 3) Peningkatan kapasitas desa dalam hal pemenuhan ketahanan pangan.
- 4) Pengorganisasian masyarakat melalui pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*Community Centre*).
- 5) Pemberian edukasi mengenai kesehatan dan medis.
- 6) Pemberian dukungan dalam kegiatan pengelolaan pantai dan hutan milik desa.
- 7) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menggunakan atau menciptakan energi terbarukan maupun kegiatan pelestarian lingkungan.

- 8) Berbagai dukungan lain yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan suatu desa.

